

ISU Sepekan

BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

2Minggu ke 3 Bulan Februari 2021 (tanggal 12 s.d 18 Feb)

MENGAWAL OTSUS PAPUA JILID II

Anin Dhita Kiky Amrynudin
Peneliti Pertama Bidang Politik Dalam Negeri
anin.amrynudin@dpr.go.id



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

ISU ATAU PERMASALAHAN

Pro dan Kontra mewarnai keberlanjutan Dana Otsus Papua hingga pada akhirnya disepakati untuk melanjutkan Dana Otsus Papua melalui Revisi UU No. 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua. Adapun pemerintah mengatur kenaikan plafon alokasi khusus menjadi 2,25%.

Namun demikian, beberapa hal patut dicermati dengan lebih baik lagi keberlanjutan Dana Otsus ini. Karena apabila berkaca dari pengalaman Otsus Papua Jilid I yang dinilai kurang berhasil terlihat dari IPM Papua Barat hanya mencapai 63,74 dan Papua 60,6. Selain itu adanya dugaan penyelewengan anggaran Otsus Papua dan Papua Barat sebelumnya yaitu sebesar 9,67 miliar terkait pembayaran fiktif pembangunan PLTA dan penyelewengan dana sebesar lebih dari 1,8 triliun rupiah.

FUNGSI DPR

Legislasi:

DPR RI perlu terus mendukung dan mengawal pembahasan revisi beleid Otsus Papua. Terutama pasca dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) pembahasan RUU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Pengawasan:

Fungsi pengawasan dilakukan oleh Komisi II DPR RI dengan terus mengawasi dan mengawal Otsus Papua Jilid II mulai dari pembahasan RUU Otsus Papua, evaluasi dan monitoring capaian kebijakan serta memastikan penegakan hukum apabila terbukti terdapat penyalahgunaan wewenang dan anggaran Otsus Papua.

ATENSI DPR RI

- Melalui tugas dan wewenangnya DPR dapat menghimpun aspirasi rakyat Papua melalui dialog bersama MRP, akademisi dan kelompok adat setempat untuk selanjutnya menjadi pembahasan dalam RUU Otonomi Khusus Papua.
- Melalui fungsi pengawasan DPR meminta pemerintah untuk secara berkala melakukan evaluasi dan monitoring atas capaian Otsus Papua Jilid II sesuai dengan PP No.6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Melalui fungsi pengawasan DPR dapat mendorong BPK, KPK dan Ombudsman terus mengawal dan mengawasi penggunaan anggaran dan pelayanan public di Papua.
- DPR dapat mendorong Polri dan Lembaga terkait lainnya untuk secara tegas mengusut penyelewengan anggaran Otsus Papua dan Papua Barat.

SUMBER

Berita Satu, "Hasil Otsus Papua Masih Jauh dari Harapan", 15 Februari 2021 dalam <https://www.beritasatu.com/nasional/733345/hasil-otsus-papua-masih-jauh-dari-harapan>

Detik.com, "Baintelkam Polri Ungkap Dugaan Penyelewengan Anggaran Otsus Papua", 17 Februari 2021 dalam <https://news.detik.com/berita/d-5377034/baintelkam-polri-ungkap-dugaan-penyelewengan-anggaran-otsus-papua>